

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh negative signifikan terhadap proporsi belanja modal.
2. Dana alokasi umum berpengaruh negative signifikan terhadap proporsi belanja modal.
3. Dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi belanja modal.
4. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negative signifikan terhadap proporsi belanja modal.
5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative signifikan terhadap proporsi belanja modal.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena dana alokasi khusus cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan prinsip teori stewardship, dimana teori ini memfokuskan pada pelayanan public.

2. Provinsi yang mendapatkan Dana alokasi umum yang besar akan lebih cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini dikarenakan dana alokasi umum digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan lainnya. Hubungan penelitian ini dengan hasil yang didapat berkaitan dengan teori stewardship sebagai landasan teori, dimana penerapan teori stewardship cenderung untuk pengeluaran yang berhubungan dengan pelayanan publik.
3. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah pembangunan berbagai fasilitas sector public akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD. Namun berdasarkan hasil penelitian ini hubungan antara PAD dengan proporsi belanja modal berhubungan negative dimana semakin besar PAD suatu daerah maka semakin kecil proporsi belanja modal suatu daerah tersebut. Hal ini dapat terjadi ketika pemerintah mengalokasikan PAD ke pembiayaan lain diluar belanja modal.
4. Syarat fundamental untuk pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Ketika pertumbuhan ekonomi dinilai baik maka pemerintah daerah cenderung akan

mengurangi proporsi belanja modalnya untuk pertumbuhan ekonomi dan akan mengalihkan anggaran tersebut ke sektor lain yang dipandang lebih penting. Karena pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di segala bidang.

5. Semakin baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak maka pemerintah akan cenderung mengurangi proporsi belanja modalnya dikarenakan asumsi pemerintah daerah dengan IPM yang bagus mempunyai tingkat kemandirian yang tinggi pada daerah tersebut.

C. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini hipotesis yang di terima hanya satu yaitu pengaruh dana alokasi khusus terhadap proporsi belanja modal, sedangkan keempat hipotesis lainnya hanya berpengaruh negative signifikan terhadap proporsi belanja modal.
2. Penelitian ini menggunakan data variatif yang belum sama.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel LKPD Provinsi, sedangkan masih terdapat banyak jenis LKPD pemerintah daerah yang lainnya, seperti LKPD Kabupaten/Kota, LKPD Kementrian/Lembaga.

D. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Melihat pengaruh Dana Alokasi Khusus yang sangat signifikan terhadap proporsi belanja modal maka sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan

anggaran Dana Alokasi Khusus yang di proporsikan ke anggaran belanja modal.

2. Penggunaan Ln agar tidak terjadi penyimpangan yang terlalu jauh.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti penerimaan pembiayaan pada APBD atas tahun anggaran sebelumnya, maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi.